

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 55/Pid.B/2009/PN-Bj)

O L E H

RAHMAD DIANSYAH SILALAH

NPM : 08 840 0150

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan sahnyanya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang dengan mengadakan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 55/Pid.B/2009/PN-Bj.

Permasalahan yang diajukan adalah: apakah yang menjadi penyebab dapat dikenakannya sanksi pidana bagi pelaku yang mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan sahnyanya hasil hutan dan bagaimana penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan sahnyanya hasil hutan.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Binjai.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa surat keterangan sahnyanya hasil hutan adalah tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perikanan (legal). Akibat dari ketimpangan antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong terjadinya pengangkutan hasil hutan tanpa surat keterangan sahnyanya hasil hutan. Tekanan hidup terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu baik untuk kebutuhan sendiri atau untuk kecurahan pasar melalui tangan para pemodal. Permainan dokumen, lazim disebut "dokumen terbang", untuk melezakan status kayu ilegal dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor sulitnya memberantas kegiatan penebangan liar. Penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan pengangkutan hasil hutan tanpa surat keterangan sahnyanya hasil hutan masih lemah, di mana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan kepada cukong besarnya jarang pernah ditangkap serta adili. Respon lemahnya penanggulangan pengangkutan hasil hutan tanpa surat keterangan sahnyanya hasil hutan ini nampak pula dari adanya kolaborasi antara pihak-pihak terkait dalam pemerintahan sehubungan dengan otonomi daerah dengan pihak cukong ilegal logging.